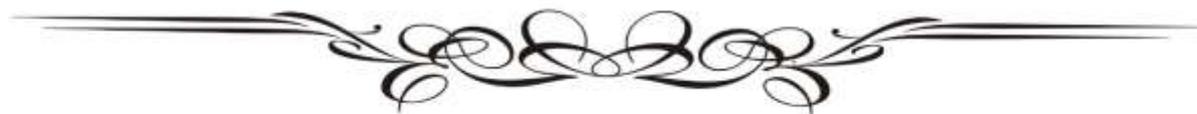


KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Jumat, 24 Agustus 2018



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 24 Agustus 2018	Infrastruktur Pendukung Akan Dibangun	Untuk pengembangan 27 kebun raya
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 24 Agustus 2018	4 Konsorsium Mengincar Konsesi	Dalam lelang ulang tol Semarang-Demak
3	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 24 Agustus 2018	Berita Foto	Truk mengantre melewati jalan Trans-Sulawesi yang rusak dan berlumpur di Konawu, Sulawesi Tenggara, pekan lalu.
4	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)	Jumat, 24 Agustus 2018	APBN 2018 Alokasikan Dana Cadangan Rp 3 Triliun	Untuk penanggulangan bencana
5	Bisnis Indonesia (Halaman, 27)	Jumat, 24 Agustus 2018	Sistem Bank Tanah Diluncurkan	Pemerintah terus berupaya untuk mendongkrak kinerja properti
6	Bisnis Indonesia (Halaman, 27)	Jumat, 24 Agustus 2018	Rel Ganda Bogor-Sukabumi Selesai 2020	Mengembangkan wilayah Jawa bagian selatan
7	Koran Tempo (Halaman, 1)	Jumat, 24 Agustus 2018	Pemerintah Diminta Rapikan Koordinasi Penanganan Gempa Lombok	Distribusi bantuan terhalang ruas jalan dan jembatan yang rusak
8	Koran Tempo (Halaman, 3)	Jumat, 24 Agustus 2018	Peringati Hari Perumahan Nasional, Pemerintah Kejar Program Sejuta Rumah	Upayakan peningkatan kualitas rumah rakyat
9	Koran Tempo (Halaman, 6)	Jumat, 24 Agustus 2018	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu Jakarta Dipercepat	Untuk menekan pencemaran air tanah dan sungai
10	Koran Tempo (Halaman, 31)	Jumat, 24 Agustus 2018	Proyek Infrastruktur Dianggap Perburuk Polusi Jakarta	Parameter PM2,5 tidak digunakan di Indonesia
11	Investor Daily (Halaman, 5)	Jumat, 24 Agustus 2018	Perlu Rock and Roll Kejar Ketertinggalan Infrastruktur	Ketertinggalan dari negara-negara maju
12	Media Indonesia, (Halaman 22)	Jumat, 24 Agustus 2018	Sosok	Beruntung Punya GBK
13	Media Indonesia, (Halaman 24)	Jumat, 24 Agustus 2018	Jalan Ruteng-Iteng Manggarai, Hancur	Jalan sepanjang 35 KM ditempuh selama 2jam

Judul	Infrastruktur Pendukung Akan Dibangun	Tanggal	Jumat, 24 Agustus 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Untuk pengembangan 27 kebun raya		

► PENGEMBANGAN 27 KEBUN RAYA

Infrastruktur Pendukung Akan Dibangun

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat akan membangun infrastruktur pendukung pada 27 kebun raya secara bertahap hingga 2019.

Pengembangan kebun raya melibatkan pemerintah daerah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kementerian sudah menjalin kerja sama dengan LIPI sejak 2000 dalam pengembangan kebun raya dengan menyusun rencana induk pengembangannya.

Menurutnya, Kementerian PUPR akan membangun infrastruktur pendukung, mulai dari jalan, sarana pembibitan, arboretum (tempat berbagai pohon ditanam dan dikembangkan untuk tujuan penelitian atau pendidikan), dan lain-lain.

Sementara itu, LIPI berwenang memilah koleksi tanaman yang akan ditanami di kebun raya.

"Anggarannya tergantung *masterplan*. Ada yang puluhan miliar [rupiah], ada yang ratusan miliar karena luasnya juga ada yang 5 hektare, ada juga yang besar seperti [Kebun Raya] Baturraden [Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah]," ujarnya, Kamis (23/8).

Basuki mengemukakan bahwa keberadaan kebun raya sangat penting untuk menambah luas ruang terbuka hijau (RTH). Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang, rasio RTH harus mencapai 30% dari luas kota. Rasio tersebut terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privasi.

Sejak 2016, Kementerian PUPR membangun infrastruktur pendukung kebun raya di empat kota, yakni Kebun Raya Jompie di Parepare, Taman Parakan di Temanggung, Taman Putroe Phang di Banda Aceh, dan Taman Adipura di Bontang. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp21,40 miliar.

Basuki mengemukakan bahwa dukungan pembangunan infrastruktur pendukung kebun raya juga sejalan dengan program kementerian, yakni Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Tahun ini, anggaran Ditjen Cipta Karya untuk pengembangan kawasan perkotaan, termasuk P2KH ialah Rp504 miliar.

Kepala LIPI Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa saat ini jumlah kebun raya di Indonesia baru mencapai 20 unit dan 5 di antaranya dikelola oleh LIPI. Beberapa kebun

Sejumlah Kebun Raya Nonperkotaan Beserta Luas

Kebun Raya	Luas (hektare)
Katingan	127
Samosir	100
Jompie	13,50
Banua	100
Liwa	86
Batam	86
Sambas	300
Lombok	130
Kendari	113
Massenrempulu	300
Sriwijaya	100
Puncak	120

Sumber : LIPI

raya kelolaan LIPI yang cukup dikenal masyarakat antara lain Kebun Raya Bogor, Cibodas, Purwodadi, dan Bali.

Pembangunan kebun raya, tuturnya, akan mengacu pada keanekaragaman hayati di tiap-tiap daerah (*eco-region*).

Selain ruang terbuka hijau, kebun raya juga berfungsi sebagai tempat konservasi tumbuhan. Dalam konvensi keragaman hayati dunia, sebanyak 70% tumbuhan di Indonesia dikoleksi

di dalam kebun raya.

"Minimal kita harus membangun 47 kebun raya. Kami akan bangun sesuai dengan prioritasnya dan ini akan bekerja sama dengan PUPR," ujar Laksana.

Dia mengemukakan bahwa luas kebun raya yang akan dibangun bervariasi, mulai dari 9 hektare hingga 200 hektare. Oleh karena itu, biaya pembangunan juga beragam, bergantung pada luas lahan yang akan disulap menjadi kebun raya.

Berdasarkan Rencana Strategis LIPI 2015—2019, lembaga itu juga menargetkan pembangunan 12 kebun raya di kawasan perkotaan dan 15 kebun raya di kawasan nonperkotaan.

Pembangunan kebun raya di daerah diarahkan untuk menampung tumbuh-tumbuhan setempat, terutama yang memiliki ekosistem spesifik.

Dalam peta jalan pengembangan kebun raya 2015—2019, terdapat kebun raya prioritas yang akan dibangun secara bertahap.

Total luas gabungan kebun raya mencapai 1.575,50 hektare. Kebun raya akan berfungsi sebagai konservasi tumbuhan, penelitian, pendidikan, hingga objek wisata. (Rivki Maulana)

Judul	4 Konsorsium Mengincar Konsesi	Tanggal	Jumat, 24 Agustus 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Dalam lelang ulang tol Semarang-Demak		

► LELANG ULANG TOL SEMARANG-DEMAK

4 Konsorsium Mengincar Konsesi

JAKARTA — Sebanyak empat konsorsium asing dan lokal meminati pengusahaan jalan tol Semarang—Demak sepanjang 26,80 kilometer yang terintegrasi dengan tanggul laut Kota Semarang dengan perkiraan investasi Rp15,34 triliun.

1000 Agustus
rene.agustine@biznik.com

Kepala Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Eka Priya Anas mengatakan bahwa dari periode pendaftaran dan pengambilan dokumen prakuualifikasi lelang sejak 31 Juli hingga 21 Agustus, sebanyak empat konsorsium mendaftar untuk mendapatkan hak konsesi atas tol yang bakal dibangun berdampingan dengan tanggul laut tersebut.

"Ada empat konsorsium. Dua konsorsium dari China dan dua lainnya dari lokal," kata Eka kepada *Bisnis*, Kamis (23/8).

Eka enggan memercini nama-nama perusahaan yang tergabung dalam empat konsorsium tersebut karena proses prakuualifikasi proyek tengah berlangsung.

Dia menargetkan hasil prakuualifikasi dapat diketahui pada bulan depan. "Pengambilan dokumen baru ditutup 21 Agustus, perkiraan sekitar 2 minggu—3 minggu lagi [hasil prakuualifikasi diketahui]."

Setelah diketahui peserta yang lolos prakuualifikasi, Eka menambahkan bahwa peserta dapat melaju ke tahap berikutnya sampai diputuskan pemenang lelang proyek yang merupakan prakarsa pemerintah

► Empat konsorsium yang meminati jalan tol Semarang—Demak berasal dari China dan Indonesia.

► Pemprov Jabar belum menerima permohonan penetapan lokasi proyek jalan tol Gedebage—Cilacap dari JSMR.

(solicited) tersebut.

Karena merupakan proyek inisiasi pemerintah, jalan tol itu akan mendapat dukungan dari pemerintah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bakal mempertimbangkan kebutuhan dukungan yang dituliskan oleh badan usaha. Biasanya, pemerintah akan memilih badan usaha yang menawarkan kebutuhan dukungan yang minim, tetapi dengan kualifikasi yang baik.

BPJT sebelumnya menargetkan proses lelang jalan tol Semarang—Demak yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN) dapat selesai pada akhir tahun ini sehingga pembangunan fisik bisa segera dimulai.

Proses pelelangan proyek ini sebelumnya sempat dilakukan pada tahun lalu hingga tahap prakuualifikasi, tetapi diputuskan untuk diulang karena adanya perubahan lingkup kerja proyek dengan adanya integrasi pembangunan dengan tanggul laut kota Semarang.

Ketika itu, dua konsorsium yakni PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., serta konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan PT Waskita Toll Road telah ditetapkan lulus prakuualifikasi pelelangan pengusahaan jalan tol Semarang—Demak.

Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) Desi Ariyani mengonfirmasi bahwa pihaknya kembali berpartisipasi untuk memengaruhi hak konsesi pengusahaan jalan tol Semarang—Demak.

Perserana masih menunggu proses selanjutnya dari BPJT terkait dengan lelang proyek yang sempat diulang itu.

"Kami ikut Semarang—Demak, baru proses pendaftaran," kata Desi belum lama ini.

BEREBUT TOL SEMARANG—DEMAK

Pembangunan tol Semarang—Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut Kota Semarang diharapkan dapat meminimalkan kemacetan yang berada di jalur pantai utara Jawa (Semarang—Demak—Surabaya). Keberadaan tanggul laut diharapkan juga dapat menahan dan mengatasi banjir rob di wilayah itu.

<p>Bentuk Proyek Solicited Project (inisiasi pemerintah)</p> <p>Pengumuman Lelang 31 Juli—21 Agustus 2018 (dikuti oleh empat konsorsium)</p>	<p>Hasil Prakuualifikasi (Desain Proyek Tanpa Tanggul) Awal 2017 meloloskan dua konsorsium:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.—PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. • PT Jasa Marga (Persero) Tbk.—PT Waskita Toll Road
--	--

<p>Panjang Ruas Tol 26,8 km</p>	<p>Nilai Investasi Rp15,34 triliun</p>	<p>Ditawarkan dalam Penajakan Pasar 10 Juli 2018</p>	<p>Hasil Prakuualifikasi Ulang (Desain Proyek Dengan Tanggul) Ditargetkan Sept. 2018</p>
--	---	---	--

Sumber: Dinas Bina Jalan Semarang



Berdasarkan catatan *Bisnis*, rencananya JSMR akan mengambil porsi mayoritas sebesar 60% dalam konsorsium tersebut, sedangkan 40% sisanya akan dimiliki oleh Waskita Toll Road.

PENETAPAN LOKASI

Di tempat terpisah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa pemprov belum menerima permohonan penetapan lokasi proyek jalan tol Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap dari JSMR.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan bahwa proses lelang investasi yang sedang digelar BPJT tersebut memang harus mengantongi pengajuan penetapan lokasi (penlok) dari Pemprov Jabar. "Namun, pengajuan penloknya belum saya terima sampai sekarang, saya minta untuk segera dimasukkan ke pemprov," katanya di Bandung, Kamis (23/8).

Menurutnya, proses pengesahan penlok proyek jalan tol tersebut tidak akan memakan waktu lama karena pembangunan proyek ini juga didukung oleh Pemprov Jabar sejak 2015.

Selain itu, proyek jalan tol ini juga sudah diakomodasi dalam rencana tata ruang dan wilayah provinsi.

"Kalau sudah ada, tinggal kami proses karena ini feasible. Prinsipnya [pengajuan] penlok datang ya, langsung proses," ujar Iwa.

Pemprov Jabar berharap supaya pemakarsa proyek jalan tol sepanjang 154 kilometer tersebut segera berkoordinasi karena penlok ini akan membutuhkan koordinasi dengan Pemkot/Pemkab Bandung, Pemkot Garut, Pemkot/Pemkab Tasikmalaya, Pemkot Banjar dan Ciamis.

"Soal tata ruang tidak ada masalah karena sudah masuk," paparnya. Pemprov Jabar juga menunggu pemba-

hasan terkait dengan kemungkinan adanya beban anggaran untuk pembebasan lahan yang harus dialokasikan daerah.

Menurut Iwa, seperti proyek tol lain, urusan pembebasan lahan dipertikakan memakan waktu dan agak menyulitkan.

"Kami tugasnya mendorong bagaimana pembebasan lahan bisa dipercepat," tuturnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa lelang investasi ruas tol prakarsa Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap sepanjang 154 kilometer masih menunggu proses penlok untuk disetujui pembangunannya oleh Gubernur Jawa Barat.

Proyek jalan tol yang diinisiasi oleh konsorsium JSMR dan PT Daya Mulla Tarung sejak 2017 itu masuk dalam salah satu dari enam jalan tol yang ditawarkan kepada investor melalui penajakan pasar yang dilakukan BPJT untuk dilelang pada tahun ini. 0637

Judul	Berita Foto	Tanggal	Jumat, 24 Agustus 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Truk mengantre melewati jalan Trans-Sulawesi yang rusak dan berlumpur di Konawu, Sulawesi Tenggara, pekan lalu.		

► **ANTRE JALAN RUSAK**



Antara/Cljcn

Truk mengantre melewati jalan Trans-Sulawesi yang rusak dan berlumpur di Desa Paku Jaya, Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, pekan lalu. Jalan Trans-Sulawesi yang menghubungkan

Sulawesi Tenggara–Sulawesi Tengah–Sulawesi Selatan rusak sepanjang sekitar 5 km akibat lalu lalang kendaraan alat berat perusahaan smelter di kawasan Morosi.

Judul	APBN 2018 Alokasikan Dana Cadangan Rp 3 Triliun	Tanggal	Jumat, 24 Agustus 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Untuk penanggulangan bencana		

► PENANGGULANGAN GEMPA LOMBOK

APBN 2018 Alokasikan Dana Cadangan Rp3 Triliun

JAKARTA — Pemerintah dalam mengantisipasi kejadian bencana, telah menyiapkan Dana Cadangan Bencana sebesar Rp3,3 triliun seperti dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018.

Puput Ady Sukarno & Yodie Hartiyan
redaksi@bisnis.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penggunaan dana tersebut akan dikoordinasikan bersama BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

"Pada APBN 2018, untuk mengantisipasi kejadian bencana telah disiapkan Dana Cadangan Bencana sebesar Rp3,3 triliun, yang penggunaannya akan dikoordinasikan bersama BNPB," ujarnya melalui akun media sosial resmi milik mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut itu seperti dikutip *Bisnis*, Kamis (23/8).

Menurutnya, BNPB telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk tambahan bantuan ke Lombok. Proses penyediaan tambahan anggaran untuk menanggapi sejumlah kerusakan yang meliputi rumah tinggal penduduk, sekolah, jalan, jembatan, gedung kantor pemerintah, pasar, dan sarana-prasarana sosial ekonomi lainnya.

"Anggaran APBN 2018 disediakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali yang akan dipergunakan pada tahun 2018 ini."

Selain anggaran untuk BNPB, lanjut dia, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk merealokasi dan merevisi anggaran dari kementerian/lembaga untuk

memberikan percepatan bantuan keuangan bagi masyarakat Lombok, sesuai kebutuhan dan sesuai sisa waktu yang cukup untuk pelaksanaan dan pencairan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2018.

Proses perbaikan dan pembangunan kembali daerah terdampak bencana di Lombok akan berlangsung sepanjang 2018. Adapun untuk 2019, dalam RAPBN 2019, pemerintah sudah menyiapkan anggaran pada beberapa Kementerian/Lembaga seperti BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kemendes & Transmigrasi dan lainnya sekurangnya Rp1 triliun.

Menurutnya, anggaran tersebut dapat segera pada awal tahun anggaran 2019, atau direalokasi atau direvisi oleh kementerian lembaga terkait di awal 2019, untuk menjamin kelanjutan pemberian bantuan dasar dan perbaikan atau pembangunan kembali pascabencana gempa.

Menurut Sri Mulyani, selain dana tersebut, dalam RAPBN 2019 telah disiapkan Dana Cadangan Bencana yang lebih besar, yang juga akan dapat digunakan untuk lanjutan bantuan dasar dan rehabilitasi & rekonstruksi sesuai kebutuhan untuk mengembalikan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana, termasuk untuk masyarakat Lombok.

"Antisipasi perencanaan tersebut sudah disiapkan pemerintah dari awal untuk melanjutkan dukungan Pemerintah dalam pembangunan daerah yang terkena dampak bencana di

Lombok agar kembali normal," jelasnya.

Selain persiapan anggaran untuk bantuan penanganan bencana, pemerintah juga telah membangun dan melaksanakan sistem mitigasi dan penanganan bencana yang lebih baik dan diharapkan semakin baik dari tahun ke tahun.

"Kita telah memiliki BNPB dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menjadi lokomotif penanganan bencana di lingkup nasional dan daerah. Dengan sistem penanganan bencana yang lebih baik, kita harapkan anggaran yang telah disiapkan akan dapat disalurkan dan didistribusikan secara tepat sasaran dan lokasinya, tepat jumlah, kualitas, dan waktu."

PERCEPATAN TRANSFER

Sementara itu, Kementerian Keuangan juga akan melakukan percepatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terkait dengan kabupaten/kota yang terdampak gempa dengan memberikan relaksasi pada prosesnya dengan tetap memperhatikan *governance* yang ada.

"Dari sisi perpajakan, untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Pulau Lombok, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kebijakan mengenai pengecualian pengeunaan sanksi perpajakan atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak," terangnya.

Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemerintah berterima kasih kepada banyak lembaga swasta, masyarakat, serta *stakeholder* lainnya yang juga telah membantu langsung ke masyarakat yang terkena musibah.

"Konsistensi dari komitmen Pemerintah akan terus berlanjut sampai masyarakat Lombok kembali pulih dan dapat meningkatkan kembali kesejahteraan hidupnya. APBN adalah instrumen untuk menja-

ga masyarakat, perekonomian, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Sejauh ini, pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sri Mulyani mengatakan jumlah dana yang disalurkan tersebut terdiri dari Rp557,7 miliar melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan sebesar Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga.

"Pemerintah telah mencairkan dana Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok."

BNPB telah menyiapkan anggaran Rp1,1 triliun dalam Program Penanggulangan Bencana, yang oleh BNPB dapat digunakan sebagai sumber dana pertama untuk pemberian bantuan ke Lombok.

Sementara, tahap pertama santunan untuk perbaikan 5.000 rumah yang rusak berat, dengan besaran santunan Rp50 juta/rumah telah dicairkan. Tahap kedua santunan perbaikan 5.000 rumah rusak berat, dan kemudian rumah rusak ringan/ sedang masih sedang disiapkan Pemerintah cq Kementerian Keuangan dan BNPB.

Presiden Joko Widodo menyatakan peraturan berupa Instruksi Presiden penanganan gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sudah ditandatangani.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden pada saat berkunjung ke kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (23/8).

Inpres tersebut membuat kementerian dan lembaga memiliki payung hukum dalam pelaksanaan penanganan gempa bumi di lapangan. "Yang paling penting, kembali lagi, adalah penanganannya. Penanganannya secara nasional telah kita kerjakan bersama dengan provinsi dan kabupaten," kata Presiden. **EB**

► Pada RAPBN 2019 telah disiapkan Dana Cadangan Bencana yang lebih besar.

Judul	Sistem Bank Tanah Diluncurkan	Tanggal	Jumat, 24 Agustus 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 27)		
Resume	Pemerintah terus berupaya untuk mendongkrak kinerja property		

► LAHAN PERUMAHAN

Sistem Bank Tanah Diluncurkan

JAKARTA — Pemerintah terus berupaya untuk mendongkrak kinerja properti. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meluncurkan program sistem bank tanah dan mulai merilis modal biaya dari Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

Gloria F.K. Lawi
gloria.francisco@blanis.com

Program sistem bank tanah tersebut diluncurkan Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional guna mengatasi masalah ketersediaan lahan untuk perumahan.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan sistem bank tanah yang sedang dikerjakan oleh kementerian itu berbeda dengan program Bank Tanah Nasional atau Batanas. Dia ber alasan, saat ini PUPR sangat membutuhkan penambahan lahan, sementara Batanas umumnya menyediakan tanah yang diprioritaskan untuk infrastruktur.

"Jadi kita punya stok tanah juga yang kita bisa gunakan, misalnya kita ada KPBU [Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha]," jelas Khalawi di kantor Kementerian PUPR, Kamis (23/8).

Dia menyatakan, pola *land banking system* ini masih dalam pembahasan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Adapun, Batanas juga masih belum rampung karena perlu sinkronisasi dengan Kementerian Keuangan. Dia berharap, konsep bank tanah yang sedang digarap ini tidak menambah beban fiskal negara.

► Sistem bank tanah lebih fokus untuk lahan perumahan, sehingga berbeda dengan program Bank Tanah Nasional (Batanas) yang umumnya diprioritaskan untuk infrastruktur.

"Maka kita pakai pola KPBU untuk mendorong saja swasta, pemerintah *supporting*-nya. Karena ini pola yang efektif untuk negara berkembang," terang Khalawi.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti menyatakan pengadaan bank tanah dalam Undang-Undang Nomor 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) disebutkan, pemerintah bisa membeli tanah dengan risiko terkalaw. Hal ini menandakan, tanah yang dibeli dengan peruntukan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus jadi, bukan untuk spekulasi.

"Nah, untuk itu badan pengelola masih dalam proses seleksi komisioner. Ada di Tabungan Perumahan Rakyat membeli tanah dengan skema KPBU bisa dikerjasamakan membangun rumah umum," ujar Lana.

BERBASIS TABUNGAN

Terkait pembiayaan perumahan, Lana menargetkan pembangunan rumah dengan modal biaya dari Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2TB) mulai di empat provinsi dan melibatkan lima bank.

Kriteria pemberian bantuan pembiayaan rumah berbasis tabungan itu ditujukan kepada pasangan suami-istri dengan penghasilan di sektor informal. Program pembiayaan perumahan ini akan dimulai di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan total 1.250 unit.

"BP2TB perlu persiapan panjang karena membina komunitas penabung," kata Lana. Dia menyebut, komunitas penabung akan dibentuk dan dibina melalui satuan Griya Kita, yaitu program pemberdayaan perumahan dari Kementerian PUPR bekerja sama dengan sejumlah lembaga swadaya



masyarakat (LSM).

Nantinya, kata Lana, fasilitator membina komunitas masyarakat yang ingin ikut mengakses BP2TB untuk mulai menabung sampai sesuai harga rumah yang ingin dibeli. "Ini agak beda dengan KPR. Kalau debitur ada penghasilan tetap, dia bisa *apply* untuk belajar menabung. Maka ini perlu dibina dulu komunitas penabung."

Lana menambahkan, ada lima bank akan mendukung program BP2TB ini yakni; Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Artha Graha, BJB, dan Bank Jatim.

Sebagai informasi, selain BP2TB, Ditjen Pembiayaan Perumahan juga mempunyai program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Adapun rumah Tapera diperuntukkan bagi rumah yang masuk kategori untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saat ini PUPR telah mendaftar 10.237 pengembang dari 16 asosiasi. ■

Judul	Rel Ganda Bogor-Sukabumi Selesai 2020	Tanggal	Jumat, 24 Agustus 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 27)		
Resume	Mengembangkan wilayah Jawa bagian selatan		

► PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Rel Ganda Bogor–Sukabumi Selesai 2020

JAKARTA — Kementerian Perhubungan menargetkan proyek jalur ganda kereta api lintas Bogor-Sukabumi-Cianjur rampung pada 2020.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan target itu itu dicanangkan seiring dengan masih tertinggalnya infrastruktur Jawa bagian selatan.

Dengan tertinggalnya infrastruktur di wilayah itu, paparnya, pemerintah pusat perlu menginisiasi pembangunan khususnya di sektor transportasi di wilayah tersebut.

"Bukan Jawa Barat bagian selatan saja, tapi Jawa bagian

selatan memang agak tertinggal. Makanya kami rapat khusus karena kami ingin menginisiasi penyelesaian Bandara Sukabumi, DT [*double track*] Jakarta-Sukabumi, Sukabumi-Cianjur," jelasnya, Kamis (23/8).

Selain bandara dan jalur ganda kereta api (KA), Menhub menyatakan pihaknya juga akan membangun pelabuhan di wilayah tersebut.

Terkait dengan target penyelesaian, Budi Karya mengatakan untuk sementara realisasi yang paling cepat adalah proyek jalur ganda KA Bogor-Sukabumi, Sukabumi-Cianjur pada 2020. "Kalau bandara masih

pembebasan lahan sekarang, kami akan selesaikan 2019-2020."

Untuk diketahui, Kemenhub mengalokasikan anggaran setidaknya Rp2,5 triliun untuk mengembangkan infrastruktur Jawa Barat bagian selatan. Infrastruktur yang dibangun mulai dari jalur ganda kereta api, bandara hingga pelabuhan.

Khusus untuk rel ganda atau *double track*, Kemenhub menyiapkan anggaran setidaknya Rp2,4 triliun.

Pemerintah berencana menetapkan pembangunan rel ganda KA Bogor-Sukabumi sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Tahap awal pembangunan jalur ganda Bogor-Sukabumi dilakukan di segmen Cigombong (Kabupaten Bogor)-Cicurug (Kabupaten Sukabumi) dengan panjang 7 kilometer. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp170 miliar.

Progres pembangunan jalur ganda Cigombong—Cicurug masih terkendala penertiban lahan yang ditempati oleh masyarakat.

Dengan selesainya jalur ganda KA Bogor—Sukabumi, perjalanan KA menjadi delapan kali per hari dari saat ini hanya dua kali perjalanan per hari.

(Dewi A Zuhriyah)

Judul	Pemerintah Diminta Rapihan Koordinasi Penanganan Gempa Lombok	Tanggal	Jumat, 24 Agustus 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 1)		
Resume	Distribusi bantuan terhalang ruas jalan dan jembatan yang rusak		

JAKARTA — Sejumlah kalangan meminta pemerintah merapihan koordinasi penanganan bencana Lombok, Nusa Tenggara Barat, agar bantuan tersebar secara merata. Hingga kemarin, korban di sejumlah lokasi belum menerima bantuan yang layak setelah lebih dari tiga pekan mengungsi.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, Kurtubi, mengatakan koordinasi di antara lembaga pemerintah dalam fase tanggap darurat harus diperkuat. "Jangan sampai ada pengungsian yang tak tertangani karena ada yang jalan sendiri-sendiri," kata politikus Partai NasDem itu kemarin.

Lebih dari 400 ribu warga Lombok mengungsi karena gempa beruntun terjadi selama tiga pekan terakhir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 555 orang meninggal. Dalam kunjungannya pekan lalu, Kurtubi menemukan sejumlah desa di Lombok Timur dan Lombok Utara belum tersentuh bantuan.

Ketua Ombudsman NTB, Adhar Hakim, menilai koordinasi di tingkat pemerintah kabupaten masih lemah. Ketika membantu pengungsi, kadang ada tim yang tumpang-tindih di satu lokasi. Sedangkan pengungsi di lokasi lain tak tertangani. "Kami berharap bupati lebih kuat lagi membangun koordinasinya, terutama dengan BNPB, TNI, dan kepolisian," ucapnya.

Di Desa Penembung Utara, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, misalnya, masih ada pengungsi yang mengaku belum mendapat bantuan. Surtatin, seorang pengungsi, menuturkan, ia dan warga desa telah mendatangi kantor kecamatan untuk meminta bantuan pangan dan selimut. Namun hasilnya nihil.

Pengungsi di Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, mengalami hal serupa. Kepala Badan Permusyawaratan Desa, Suwarjo, mengatakan pengungsi di Dusun Pulur belum mendapatkan bantuan apa pun. Untuk memenuhi kebutuhan pokok, warga dusun harus mengambil ke pos pengungsian di pinggir jalan atau ke kantor kecamatan yang berjarak sekitar 30 kilometer.

Sementara itu, di lokasi pengungsian lain, bantuan malah berlimpah. Misalnya, di Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, dan



Petugas mengangkut paket bantuan untuk pengungsi gempa Lombok di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa lalu.

PEMERINTAH DIMINTA RAPIKAN KOORDINASI PENANGANAN GEMPA LOMBOK

Distribusi bantuan terhalang rusaknya ruas jalan dan jembatan.

Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Di Kantor Pos Kota Mataram, ratusan ton logistik juga bertumpuk. Bantuan belum tersebar karena banyak ruas jalan dan jembatan yang rusak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan koordinasi di antara perangkat yang terlibat dalam penanganan bencana Lombok

dilakukan berkala setiap hari. BNPB juga menyediakan *call center* yang bisa dihubungi pengungsi yang kekurangan bantuan. "Secara umum semua titik pengungsi sudah menerima bantuan," kata dia. Masalahnya, belum semua wilayah menerima bantuan secara rutin, misalnya tiga hari sekali. "Di beberapa tempat belum."

● ANIPPATI M. NURI (LOMBOK) | WIKIS MAJALANG | ETRI

Menumpuk, Banyak Kendala

Sudah lebih dari tiga pekan ratusan ribu warga Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengungsi akibat gempa beruntun. Sekitar 2.000 ton bantuan dari berbagai lembaga sudah tiba, tapi masih menumpuk di sejumlah titik dan belum terbagi merata.

Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menuturkan, penyaluran bantuan terhambat oleh rusaknya jalan dan jembatan—terutama yang menuju kawasan terpencil. Tim BNPB berusaha mengirim bantuan dengan menggunakan truk dan helikopter.

JEMBATAN RUSAK:

- Tampes (penghubung antara Kecamatan Bayan dan Kayangan, Lombok Utara)
- Lokok Duren (penghubung antara Kecamatan Kayangan dan Gangga, Lombok Utara)
- Bayan
- Lempenge
- Luk
- Sokong
- Lokok Tampes

JALAN RUSAK:

- Ruas Jalan Pemenang-Bayan
- Longsoran tebing di Km 61
- Longsor di Km 63
- Jalan amblas di Km 57
- Lubang dan longsor di bahu jalan Km 59



BANTUAN BERLEMPAH:

1. Kota Mataram
2. Lombok Barat
3. Kecamatan Tanjung, Lombok Utara
4. Kecamatan Selong, Lombok Timur

BANTUAN KURANG:

1. Desa Gumantar
2. Desa Sukadana
3. Desa Senaru
4. Desa Ganggalang
5. Dusun Majalangu
6. Desa Penembung Utara

7. Desa Wates
8. Desa Gunung Malang
9. Desa Koko Putih
10. Dusun Pulur Labu Pandan
11. Kecamatan Obel-Obel
12. Kecamatan Blanting
13. Kecamatan Madayin

Judul	Peringati Hari Perumahan Nasional, Pemerintah Kejar Program Sejuta Rumah	Tanggal	Jumat, 24 Agustus 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 3)		
Resume	Upayakan peningkatan kualitas rumah rakyat		

PERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL, PEMERINTAH KEJAR PROGRAM SEJUTA RUMAH

Sejak dicanangkan pada 2015, capaian Program Satu Juta Rumah terus bertambah setiap tahun. Tahun ini, Kementerian PUPR optimistis target 1 juta unit rumah akan tercapai.

Setiap 25 Agustus diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional. Peringatan ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi semua stakeholder terkait di bidang perumahan, baik pemerintah pusat, badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah daerah, maupun pengembang, untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap upaya penyediaan rumah rakyat yang berkualitas.

Saat ini, tantangan di sektor perumahan terbilang berat. Simak saja, pada 2015, ada sekitar 11,4 juta unit kebutuhan pasokan rumah yang belum terlayani (backlog) di negeri ini. Untuk itu, pemerintah menargetkan agar backlog perumahan itu bisa turun menjadi 6,8 juta unit pada 2019. Guna mengejar target itu, pemerintah pun menggelar Program Satu Juta Rumah.

"Ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan peran stakeholder untuk meningkatkan supply perumahan, terutama bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid.

Sesuai namanya, tujuan utama Program Satu Juta Rumah adalah mengejar tercapainya pasokan satu juta unit rumah per tahun. Namun, tak gampang mencapai tujuan itu. Sebab, rantai pasok perumahan begitu panjang. Mulai dari ketersediaan lahan, perizinan, penyediaan bahan bangunan, pembangunan rumah, sampai pembiayaan dan masalah penghunian. Dan, setiap tahap rantai pasok memiliki hambatan masing-masing yang melibatkan



Khalawi Abdul Hamid
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

berbagai pihak. Hal yang jelas, ketersediaan lahan murah sangat terbatas. Lalu, pada rantai penyediaan bahan bangunan misalnya, ada kendala mahalnya bahan bangunan, dan harga bahan bangunan yang berbeda di berbagai daerah.

Meski begitu, upaya untuk mengejar target Program Satu Juta Rumah terus mengalami peningkatan. Buktinya, sejak Program Satu Juta Rumah dicanangkan pada tanggal 29 April 2015 oleh Presiden Joko Widodo di Ungeran, Jawa Tengah, capaian program satu juta rumah terus bertambah setiap tahun. Pada 2015, jumlah capaian pembangunan rumah sekitar 699.770 unit rumah, lalu pada 2016 naik menjadi 805.169 unit dan pada 2017 meningkat lagi hingga 904.758 unit rumah.

Adapun jumlah pembangunan hunian yang termasuk Program Satu Juta Rumah tahun ini, tepatnya status sampai tanggal 20 Agustus 2018, capaian Program Satu Juta rumah sudah mencapai 582.638 unit. "Kami tetap optimistis akan mampu mencapai satu juta unit tahun ini. Kami masih punya waktu 4,5 bulan lagi," kata Khalawi, saat konferensi pers di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis 23 Agustus 2018.

Khalawi menambahkan, untuk mengejar pembangunan satu juta

rumah itu, Kementerian PUPR akan menjalankan tiga strategi. Strategi yang pertama adalah melalui pembangunan rumah yang dilakukan oleh pemerintah dan Perda. Yaitu, berupa pembangunan Rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya, serta dengan memberikan bantuan stimulan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Porsi dari strategi pertama ini menyumbang 20 persen dari target.

Strategi kedua, pembangunan rumah dilakukan oleh pengembang (swasta) namun dengan bantuan subsidi dari pemerintah. Subsidi ini bisa berupa kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KPR selisih bunga, serta bantuan uang muka. Strategi kedua ini diharapkan dapat menyumbang 30 persen dari target.

Sementara, strategi ketiga pembangunan rumah dilakukan oleh pengembang dengan memanfaatkan kemudahan regulasi dari pemerintah. Misalnya, regulasi kemudahan perizinan, harga khusus untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kemudahan regulasi infrastruktur, konstruksi, dan sebagainya. Dari strategi yang satu ini, diharapkan menyumbang 50 persen dari target.

Hapernas 2018, Wujudkan Rumah Rakyat Berkualitas

Memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar berbagai rangkaian kegiatan. Mulai dari melakukan ziarah ke makam Bapak Perumahan Indonesia Mohammad Hatta, ziarah ke makam Menteri Pekerjaan Umum 1988-1998 Radinal Mochtar, menggelar turnamen *gatedball* antarmitra perumahan, sampai menyelenggarakan Pameran Perumahan Rakyat pada 22-30 September 2018 di Jakarta Convention Center, dan melakukan peresmian rumah layak huni pada 2 Oktober 2018 di Palu.

Selain itu, diselenggarakan pula *workshop* tentang "Disruptive Technology for Affordable Housing" pada 17 September 2018 di Kementerian PUPR. *Workshop* ini dilakukan bekerja sama dengan Bank Dunia. Tak

kalah menarik, Kementerian PUPR juga menggelar sayembara rumah tapak dan rumah susun bersubsidi pada Juli-September 2018. "Hingga 23 Agustus 2018 telah masuk 1.288 pendaftar," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti.

Menurut Lana, sayembara ini bertujuan untuk mendapatkan rumah khas Indonesia dari masing-masing daerah, baik dari sisi desain maupun bahan bangunan, sehingga tampilan rumah di Indonesia tak harus selalu monoton.

Hapernas tahun ini mengambil tema "Mewujudkan Rumah Rakyat Berkualitas". Melalui momentum ini, semua stakeholder baik pemerintah pusat, BUMN, pemerintah daerah, dan pengembang diharapkan dapat memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap kualitas rumah yang dibangun. ●

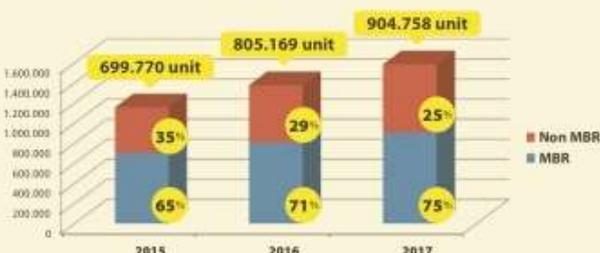
Khalawi menambahkan, rumah yang telah terbangun melalui program pemerintah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dan bahkan mengalami percepatan pertumbuhan yang signifikan. Untuk rumah susun, selama 12 tahun yakni sejak 2005-2017, telah terbangun 1.416 *unit block* Rusun untuk masyarakat atau sekitar 61.019 unit. Sementara dalam waktu tiga tahun dari 2015-2017 pemerintah sudah membangun 456 *unit block* Rusun atau sebanyak 31.488 unit Rusun. "Dalam tiga tahun terakhir telah tersedia hampir setengahnya dibanding periode 2005-2017. Ini bukti nyata bahwa pemerintah benar-benar hadir dalam sektor perumahan dan bertukar nyata kepedulian pemerintah terhadap penyediaan perumahan rakyat," ujar Khalawi.

Selain itu, untuk mendukung Program Satu Juta Rumah dan mengatasi backlog ketersediaan pasokan rumah,

dari sisi pembiayaan Kementerian PUPR terus berusaha meningkatkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah melalui sejumlah program pembiayaan perumahan. Antara lain, melalui KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

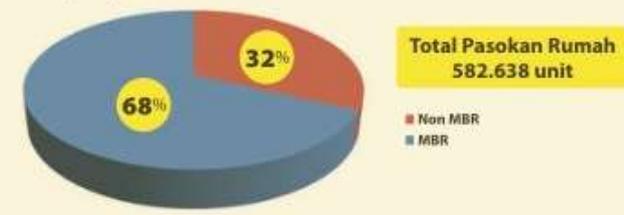
Pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Rumah Sederhana Tapak dan Sarusunami, serta Penurunan Pajak Penghasilan Final (PPH) dari 5 persen menjadi 1 persen, bagi pengembang yang membangun rumah bersubsidi. Semua dilakukan untuk mengejar Program Satu Juta Rumah, sekaligus menjawab tantangan berat yang ada di sektor perumahan. ●

Capaian Program Satu Juta Rumah (2015-2017)



Capaian Program Satu Juta Rumah (2018)

*Data hingga 20 Agustus 2018



Sumber: Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR

Judul	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu Jakarta Dipercepat	Tanggal	Jumat, 24 Agustus 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 6)		
Resume	Untuk menekan pencemaran air tanah dan sungai		

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu Jakarta Dipercepat

Untuk menekan pencemaran air tanah dan sungai.

Gangsar Parikesit
gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mempercepat pembangunan instalasi pengolahan air limbah terpadu di zona 1 dan 6 Jakarta. Kementerian menargetkan kontrak konstruksi Jakarta Sewerage System di Pluit, Jakarta Utara, dan Duri Kosambi, Jakarta Barat, tersebut akan diteken pada akhir tahun ini.

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dodi Krispratmadi, menentukan, semula pembangunan sistem pengolahan limbah terpadu zona 6 dijadwalkan berlangsung setelah pembangunan instalasi di



Waduk Setiabudi di kawasan Kuningan, Jakarta, 24 Juli lalu.

zona 1 rampung. "Sekarang kami bangun bersamaan," ujar dia kepada *Tempo*, kemarin.

Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah DKI Jakarta berencana membangun sistem pengolahan air limbah terpadu di 15 zona. Dari 15 zona itu, yang telah beroperasi baru instalasi di zona 0 yang berlokasi di Waduk Setiabudi, Jakarta Selatan. Kapasitas instalasi Setiabudi selitar

42 ribu meter kubik per hari—setara dengan 4 persen limbah cair yang dihasilkan Jakarta.

Menurut Dodi, pembangunan sistem pengolahan air limbah di 15 zona sangat mendesak. Sebab, berdasarkan pengujian oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, air tanah dangkal di 267 lokasi di Ibu Kota tercemar detergen (64,4 persen dari sampel) dan bakteri

Escherichia coli (39,7 persen). Pengujian mutakhir oleh Dinas Lingkungan juga mengungkapkan 20 sungai di Ibu Kota tercemar berat oleh *E. coli* dan pelbagai polutan lainnya. Dodi menjelaskan, desain

sistem pengolahan limbah terpadu zona 1 Pluit telah rampung pada Februari lalu. Adapun proyek sistem pengolahan limbah terpadu zona 6 Duri Kosambi akan dimulai dengan pembangunan rumah pompanya. Lelang proyek di kedua zona ditargetkan berlangsung pada Oktober mendatang. "Pembangunannya kami kerjakan paralel," ujar dia.

Meski ada percepatan, menurut Dodi, pembangunan sistem pengolahan limbah terpadu zona 1 dan 6 akan dilakukan secara hati-hati. "Kami enggak mau ada kesalahan dalam desain dan lelang," kata dia. Proyek instalasi pengolahan limbah di kedua zona dibiayai oleh uang pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA), masing-masing Rp 8,1 triliun dan

Rp 8,7 triliun.

Setelah selesai dibangun, instalasi pengolahan limbah terpadu akan dioperasikan badan usaha milik daerah DKI Jakarta, PD PAL Jaya. Direktur Utama PD PAL Jaya, Subekti, memperkirakan instalasi pengolahan limbah zona 1 akan rampung pada 2023. PAL Jaya akan mulai merekrut karyawan baru untuk mengoperasikan instalasi baru tersebut pada 2022. "Karyawannya juga perlu dilatih lebih dulu," ucap dia.

Sembari menunggu pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu, menurut Subekti, PAL Jaya akan mencegah perluasan pencemaran air tanah dangkal dan air sungai di Ibu Kota. Perusahaan pelat merah itu akan memasarkan tangki septik Biopal melalui program One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship (Oke-OCCE).

Menurut Subekti, Biopal merupakan tangki septik modifikasi yang bisa mengolah limbah rumah tangga seperti tinja dan hasil air bekas cucian. "Pencemaran itu harus diatasi dari sumber polutannya," ujar dia. ●

BANK BRI

Apresiasi Kemenangan Timnas U – 16 di Piala AFF 2018

—KLAN

Judul	Proyek Infrastruktur Dianggap Perburuk Polusi Jakarta	Tanggal	Jumat, 24 Agustus 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 31)		
Resume	Paramer PM2,5 tidak digunakan di Indonesia		

Proyek Infrastruktur Dianggap Perburuk Polusi Jakarta

Parameter PM2.5 tidak digunakan di Indonesia.

Jobpie Sugiharto
jobpie@tempo.co.id

JAKARTA — Pembangunan infrastruktur disebut turut menyumbang pencemaran udara di DKI Jakarta. Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Agung Pujo Winarko, menyatakan proyek infrastruktur menimbulkan debu yang masuk kategori *particulate matter* (PM), salah satu acuan untuk mengukur indeks pencemaran udara.

"Misalnya, kita lagi membangun (kereta) MRT, LRT, dan ruas jalan tol dalam kota. Ada juga (proyek) *underpass* dan *flyover*," kata Agung kepada *Tempo*, kemarin.

Agung pun menilai peningkatan pencemaran udara wajar terjadi seiring dengan geliat pembangunan infrastruktur dalam lima tahun terakhir. "Pembangunan di Jakarta lagi heboh-hebohnya. Itu

berkolerasi dengan debu yang timbul."

Dia menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin, bahwa polusi udara di Ibu Kota dalam lima tahun terakhir relatif tinggi, mengacu pada parameter dominan PM2.5, PM10, dan SO2. Kesimpulan tersebut juga didasari pantauan kualitas udara oleh pemerintah DKI pada 2012-2017 serta Kedutaan Besar Amerika Serikat pada 2016-2017.

Media asing *Al Jazeera* pun menerbitkan berita berjudul *Air Pollution Welcomes Athletes in Jakarta for Asian Games* pada 17 Agustus lalu, sehari menjelang pembukaan Asian Games XVIII di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Menurut *Al Jazeera*, tingkat polusi udara di Jakarta meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Berita senada juga pernah dipublikasikan oleh *BBC Indonesia*.



Pembangunan trek LRT (light rail transit) di Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13 Juli lalu.

TEMPO/FAHRI HERBASOHI

Judul	Perlu Rock and Roll Kejar Ketertinggalan Infrastruktur	Tanggal	Jumat, 24 Agustus 2018
Media	Investor Daily (Halaman, 5)		
Resume	Ketertinggalan dari negara-negara maju		

MENTERI PUPR:

Perlu *Rock and Roll* Kejar Ketertinggalan Infrastruktur

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan perlu cara *rock and roll* untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur Indonesia dari negara-negara lain.

Basuki dalam orasi ilmiahnya berjudul Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan di Sarwono Prawirohardjo yang digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Kamis, mengatakan selain meningkatkan daya saing, pembangunan infrastruktur sudah menyumbang 0,82% pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jadi pembangunan infrastruktur ini sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan yang banyak sekali dari negara-negara lain. Tidak mudah, karenanya perlu dengan cara *rock and roll* untuk melakukannya," kata Basuki.

Indonesia sebenarnya sudah lebih dulu membangun in-

frastruktur seperti jalan tol dan sebagainya dibanding dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, namun sekarang justru tertinggal.

"Persaingan (kontraktor) sekarang untuk yang cepat dan lambat, bukan lagi yang besar dengan yang kecil untuk pembangunan," kata Basuki.

Untuk menjawab tantangan konektivitas, Basuki mengatakan mulai 2015 hingga 2019 pemerintah akan menyelesaikan pembangunan dan mengoperasikan jalan tol baru sepanjang 1.852 kilometer (km), pembangunan jalan nasional baru sepanjang 2.650 km dan 500 km jalan akses menuju 24 pelabuhan utama, 60 pelabuhan penyeberangan, dan jalan pendukung pengembangan 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Upaya-upaya membangun konektivitas ini ditujukan untuk menurunkan waktu tempuh di jalur logistik utama dari 2,7 jam

per 100 km pada 2014 menjadi 2,2 jam per 100 km pada 2019. Selain itu, menurunkan biaya logistik dari 24% angka Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 20%, serta menggerakkan potensi ekonomi wilayah, terutama di luar Pulau Jawa yang selama ini terpendam.

Berdasarkan data World Economic Forum (WEF) 2018, keseluruhan pembangunan tersebut telah secara agregat meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia sebanyak 20 peringkat dari urutan 72 pada 2014-2015 menjadi urutan 52 pada 2017-2018, serta daya saing global di peringkat 36 untuk 2017-2018.

Kepala LIPI Laksana Tri Handoko mengatakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terpilih memberikan orasi ilmiah karena sosoknya yang aktif dalam pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dengan mengedepankan inovasi dan iptek. (tm/ant)

Judul	Sosok	Tanggal	Jumat, 24 Agustus 2018
Media	Media Indonesia, (Halaman 22)		
Resume	Beruntung Punya GBK		

Beruntung Punya GBK

SAYA baru bertemu pejabat Tiongkok. Mereka bilang tidak banyak negara di dunia ini yang punya kompleks olahraga seperti Gelora Bung Karno (GBK). Lokasinya strategis di tengah kota, hijau, dan fasilitasnya juga lengkap.

Jadi, kawasan GBK ini tidak hanya spesifik untuk olahraga. Kawasan itu bisa juga menjadi tempat untuk rekreasi keluarga.

Kota, kalau tidak ada kawasan hijaunya, warganya pasti beringas dan mudah stres. Memang dampak itu tak terasa, tapi nyata.

Karena itu, fasilitas yang manusiawi di kota perlu dibangun. Sebuah kota harus punya fasilitas untuk warganya berinteraksi.

Setelah ini, yang penting kita harus memeliharanya sebagai warisan. Kita juga akan membangun sarana lain agar atlet kita lebih berprestasi. Tidak adil meminta mereka menjadi juara dunia, tapi tidak menyediakan fasilitas yang baik. (Dhk/R-1)



MI/PANCA SYURKANI

Basuki Hadimuljono

Menteri PU-Pera

Judul	Jalan Ruteng-Iteng Manggarai, Hancur	Tanggal	Jumat, 24 Agustus 2018
Media	Media Indonesia, (Halaman 24)		
Resume	Jalan sepanjang 35 KM ditempuh selama 2jan		

INFRASTRUKTUR

Jalan Ruteng-Iteng, Manggarai, Hancur

RUTENG, KOMPAS — Ruas jalan yang menghubungkan Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, dengan sejumlah kecamatan di pesisir selatan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, rusak berat. Jalan sepanjang 35 kilometer harus ditempuh dua jam perjalanan karena kondisi jalan berlubang, sempit, dengan sisi tebing yang sering longsor.

Sensi Fortu (28), sopir angkutan pedesaan jurusan Ruteng-pantai selatan Manggarai, di Ruteng, Kamis (23/8/2018), mengatakan, ruas jalan Ruteng-Iteng, ibu kota Kecamatan Satarmese, rusak sejak 2009, tetapi sampai hari ini belum ada perbaikan dari pemerintah.

Jalan sepanjang 35 kilometer itu berlubang dengan kubangan air di sejumlah titik. Batu-batuan tergeletak di badan jalan akibat pengikisan dan longsor tebing jalan. Beberapa titik badan jalan nyaris putus akibat longsor. Setiap hari rata-rata 100 kendaraan melintas di jalan selebar 4 meter itu. Di titik tertentu, dua kendaraan sulit berpapasan sehingga salah satu kendaraan harus mundur beberapa meter untuk memberi ruang bagi kendaraan lain melintas. Yang paling menakutkan jika berpapasan persis di tanjakan, dengan kondisi jalan buruk dan longsor di sisi kiri-kanan jalan.

"Kami masyarakat jadi korban. Padahal, ruas jalan Ruteng-Iteng menghubungkan daerah potensial di selatan Manggarai, yakni sentra produksi padi dan hasil pertanian lain. Menghubungkan pula destinasi pariwisata seperti Waerebo dan kampung adat Todo. Jalan itu menghubungkan Kecamatan Satarmese, Satarmese Selatan, Satarmese Barat, dan Satarmese Utara," kata Fortu.

Bupati Manggarai Deno Kamilus mengatakan, jalan itu merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi NTT. Pemda Manggarai hanya bertanggung jawab merawat dan mengatasi secara darurat jika terjadi longsor atau kemacetan di jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov NTT Andre Koreh mengakui, ruas jalan Ruteng-Iteng merupakan tanggung jawab pemprov. Namun, anggaran pemprov terbatas sehingga hanya bisa melakukan perbaikan. "Membangun jalan provinsi di 22 kabupaten/kota di NTT butuh anggaran Rp 4,9 triliun. Dana APBD provinsi untuk pembangunan infrastruktur jalan hanya Rp 100 miliar per tahun," kata Koreh. (KOR)